

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan mengenai Program Makan Bergizi Gratis dan Implikasinya terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Payakumbuh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Hukum Tata Negara dan pembangunan hukum nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya berkedudukan sebagai manifestasi kewajiban negara (*state obligation*) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi. Namun, secara arsitektur hukum dan realitas sosioekonomi masyarakat, kebijakan ini dinilai cacat sejak lahir akibat ketiadaan payung hukum yang komprehensif. Desain kebijakannya tergolong rapuh karena hanya bersandar pada instrumen Peraturan Presiden (Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025) tanpa didasarkan pada Undang-Undang khusus setingkat UU Induk. Kondisi tersebut memicu anomali hierarki perundangundangan, berpotensi mengabaikan fungsi legislasi DPR (*checks and balances*), serta menimbulkan dilema dalam postur anggaran pendidikan (APBN) secara konstitusional. Lebih lanjut, ketiadaan landasan hukum yang kuat ini melahirkan regulasi buta secara empiris yang turut mematikan pendapatan pedagang kecil dan UMKM di daerah. Membiarkan program ini berjalan tanpa payung UndangUndang dan perlindungan ekonomi kerakyatan sama halnya dengan membiarkan negara mempraktikkan ketidakadilan sosial berkedok kesejahteraan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MAN 2 Kota Payakumbuh memberikan implikasi langsung berupa penurunan drastis omzet harian pedagang kantin hingga mencapai

rata-rata 67,47% dibandingkan sebelum adanya program MBG. Program MBG juga menyebabkan perubahan pola konsumsi siswa. Siswa yang sebelumnya sering membeli jajanan saat jam istirahat maupun setelah pulang sekolah menjadi lebih jarang membeli makanan di sekitar lingkungan sekolah. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi pedagang kecil di sekitar sekolah mengalami penurunan. Untuk mempertahankan usaha mereka, sebagian pedagang mulai melakukan strategi adaptasi seperti mengurangi jumlah dagangan, lebih memfokuskan ke makanan ringan dan minuman dibandingkan makanan serta melakukan penyesuaian harga dan variasi produk agar tetap menarik minat pembeli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki implikasi tidak hanya pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil di sekitar sekolah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan evaluasi dalam pelaksanaan program agar tujuan peningkatan gizi siswa dapat berjalan seimbang dengan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji bentuk kebijakan atau solusi yang mampu meminimalkan dampak ekonomi terhadap pedagang kecil tanpa mengurangi manfaat program MBG bagi siswa.

3. Berdasarkan tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan secara sentralistik dan mengabaikan pelaku usaha kecil justru telah melenceng dari prinsip dasar *tasharruf al-imam* karena melahirkan mafsadah struktural yang memarjinalisasi dan mematikan mata pencaharian UMKM lokal. Mengingat kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* menegaskan bahwa menolak kemudaratatan harus didahulukan daripada menarik manfaat, program ini cacat secara substansial apabila pencapaian gizi peserta didik harus dibayar dengan runtuhnya

keadilan distributif dan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil di akar rumput.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, diperlukan adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap pelaku UMKM yang terdampak oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan keberhasilan MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga perlu melakukan pemetaan dan pendataan terhadap UMKM yang mengalami perubahan pendapatan akibat pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antara Dinas Koperasi dan UMKM, pihak sekolah, SPPG dan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan MBG dapat berjalan sejalan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM.
2. Bagi pemerintah dan pihak penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok program perlu lebih dikembangkan. Pelaku UMKM yang mampu memenuhi persyaratan legalitas, kualitas, kuantitas dan keamanan pangan dapat diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari penyediaan bahan baku atau kebutuhan pendukung program MBG. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat dan mendorong pemberdayaan UMKM lokal.
3. Bagi pihak MAN 2 Kota Payakumbuh, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dengan pedagang kantin dalam pelaksanaan MBG. Pihak madrasah dapat menjadi penghubung antara pedagang kantin, pemerintah daerah dan pihak penyelenggara MBG sehingga perubahan pola konsumsi siswa tidak sepenuhnya membebankan dampak ekonomi kepada pedagang. Selain itu, pihak madrasah dapat

memberikan ruang bagi pedagang untuk menyesuaikan jenis dan bentuk usaha dengan kondisi konsumsi siswa setelah pelaksanaan MBG.

4. Bagi pelaku UMKM, perubahan pola konsumsi siswa setelah adanya MBG perlu diikuti dengan penyesuaian strategi usaha. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan variasi produk, menjaga kebersihan dan keamanan pangan, melengkapi legalitas usaha serta meningkatkan kemampuan pemasaran agar dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari perubahan kebijakan pemerintah, termasuk peluang untuk bekerja sama dengan SPPG dalam rantai pasok Program MBG.
5. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis dan UMKM dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi jumlah sekolah, jumlah pelaku UMKM maupun wilayah penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam melibatkan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok MBG serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada UMKM yang mengalami dampak ekonomi akibat pelaksanaan program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, A. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Sampil Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Semesta Garuda.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236. doi : 10.31604/jips.v12i6.2025. 2226-2236
- Anisya, P. A. (2024). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, 3(1). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1,2275>
- Anwar Pohan, A. (2025). *Analisis Yuridis Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Syekhli HasanAhmadAddaryPadangSidimpuan.<http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/13515>
- Azzahri, D., & Fadilah, Q. P. R. (2026). Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah. *AD-DUSTUR Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 3653(c), 74–86. <https://doi.org/10.58326/jad.v2i2.572>
- Bahri ZR, S. (2025). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Pinrang(AnalisisSiyasahSyar’iyyah)*.<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11235>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi* (Cetakan I). Penerbit Samudra Biru.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Ke2).Diterjemahkan oleh Samudra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Elfiani, F., & Nofrizal. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Landasan Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Journal Of Juridische Analyse*, 5(01), 68–77. <https://doi.org/10.30606/joja.v5i01.4517>
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqih: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cetakan I). Penerbit Zikrul Hakim.
- Fitria, S., & Sitabuana, T. H. (2021). Penerapan Konsep Welfare State dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia. *Hukum Adigama*, 4, 51–72. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13568>.
- Hanasi, R. A., Tuna, M. R., Burhan, D. P., Sila, M. O., Ladjulu, A., & Abuba, S. N. A. (2025). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Indonesia sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah. 9, 38022–38028. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34647>
- Hasan, R. (2024). Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 5–8. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.812>
- Juanta, P., Sari, P., Marsanda, R., & Harefa, O. Y. (2026). Dampak Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) terhadap Status Gizi Siswa Sekolah Dasar : Studi Komparatif pada SD Swasta Ikal Bulog dan SD Negeri 005 Bangko Kiri Tahun Ajaran 2025 / 2026. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 2582. [doi.org/10.63822/x9qdjd98](https://doi.org/10.63822/x9qdjd98)
- Kelara, B. N., Siregar, T. R. Y., Febrianti, R., Mardyaningsih, W., Akhmad, G., & Rinandy, A. A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis Dan Kesejahteraan Pekerja Umkm : Peran Penyerapan Sdm Dan Kondisi Keuangan Rumah Tangga Di Palembang. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi*, 10(2), 161–168. <https://doi.org/10.54077/jembatan.v10i2.247>
- Maidatul Umah, B. (2026). Analisis Epistemologis, Literatur Klasik, dan Integrasi Metodologi Siyasah Dusturiyah pada Tata Kelola

- Konstitusional Modern Bella. *Syariah dan Hukum Islam*, 11(1), 132–149. <https://doi.org/10.31538/adlh.v11i1.10559>
- Maulidya, A., Kusuma, Y. T., Sriwijaya, U., Lampung, U., & Pesawaran, S. D. (2026). *Dampak Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis Terhadap Ekonomi Mikro di Lingkungan Sekolah ( Studi Kasus UMKM Jajanan Sekolah di Kabupaten Pringsewu )*. 10, 602–614. <https://doi.org/10.31604/jim.v10i1.2026.602-614>
- Meirison. (2016). Masalah Dan Penerapannya Dalam Siyasah As-Syar'iyah. *ejournal.uinib.ac.id*. <https://doi.org/10.15548/ijt.v32i1.32>
- Musyahid Idrus, A. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah. *Al-Daulah*, 10(2), 123–137. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- Pebriyani, S., Hi, R., & Sultan, L. (2025). *Logika Maqāṣid al-Syarī ' ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam*. 24(2), 349–362. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10575>
- Permana, A., Ayu, M., Husaeni, F., Hawa, M., Ruhimasari, S., & Pajar Surya, P. (2025). Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1 no 5. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.293>
- Putri, T. W. (2026). *Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional (Studi Kasus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siteba, Kecamatan Nanggalo Kota Padang)*. Universitas Bung Hatta.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif :Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal Of Management Accounting and Administartion*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rais, D. U., & Setyawan, D. (2022). *Kebijakan Sosial: Sejarah, Teori, Konsep, dan Praktik* (Cetakan Pe). Forind.
- Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Riwanto, A. (2018). *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi* (Cetakan Pe). Oase Pustaka.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. UMSIDA Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research Indonesian Insitite For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(September), 112–113. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Suyaman, P. (2024). Masalah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath. *Krtha Bhayangkara*, 18(2), 422–423. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>
- Tahtazany, Z., & Sommaliagustina, D. (2026). *Analisis Yuridis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Kebijakan Publik: Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Manfaat Jenis penelitian: yuridis normatif/doktrinal*.
- Umam, K. (2023). Umer Chapra ' s Critique of The Western Concept of Welfare State. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam E-ISSN:*, 11(2), 138–139. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i2.985>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). *Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis ( MBG ) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. 01(03), 426–435.  
<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/622>

